

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB telah selesai disusun dengan baik.

Renja DP3AP2KB Provinsi NTB mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renja ini merupakan siklus pertama yaitu Perencanaan dari 5 (lima) siklus manajemen berbasis kinerja.

Renja DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2021 masih mengacu pada Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023, karena Renstra tersebut belum direvisi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi program dan kegiatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mataram, Agustus 2020

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB

Ir. HUSNANIDIATY NURDIN, MM

NIP. 19620203 198603 2 009

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Amanat UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah dapat menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan dimulai dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan), dan setiap daerah dapat menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan juga setiap SKPD mewajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan konsep dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rancangan Awal Renja OPD adalah sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunandaerah. Rancangan Awal Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, dan memuat tujuan dan sasaran renja memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkandalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **1.2.Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, tatacara, penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu:

#### **1. Maksud**

Maksudnya adalah untuk memberi arah dan mengoptimalkan pencapaian target kinerja dalam rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah pembangunan daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui perencanaan kinerja tahunan.

#### **2. Tujuan**

Tujuannya dari penyusunan rencana kerja DP3AP2KB tahun 2021 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran DP3AP2KB Provinsi NTB untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Provinsi NTB tahun 2021.
- b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2021 yang hasilnya akan dtuangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan laporan kinerja.

#### **1.4.Sistematika Penulisan Renja OPD**

Sistematika penulisan Rencana Kerja DP3AP2KB Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

##### **Bab I :Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah, hasil Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III :Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah (program strategis daerah) sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah.

##### **Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Pada Bab ini menguraikan sumber rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

##### **Bab V:Penutup**

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran seandainya tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas output (keluaran) yang dihasilkan suatu program dan kegiatan. Berikut ini uraian untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	KET.
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	62,41	
		Rata-rata usia kawin pertama	Tahun	20,57	

#### 2.1.1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator yang mendukung sasaran strategis tersebut yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG). IDG terdiri dari 3 komponen utama yaitu partisipasi perempuan pada lembaga legislatif, perempuan profesional dan sumbangan pendapatan perempuan dan IDG ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB dan yang melatarbelakangi dipilihnya IDG menjadi IKU karena mewakili 2 (dua) urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak terdiri dari 2 (dua) komponen utama yaitu partisipasi perempuan pada lembaga legislatif dan sumbangan pendapatan perempuan sedangkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 1 (satu) komponen utama yaitu perempuan profesional. Indikator lain yang mendukung sasaran strategis ini seperti tertera di bawah ini. Berikut ini uraian kerjanya:

#### 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator yang mendukung sasaran strategis tersebut yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG).

IDG terdiri dari 3 komponen utama yaitu partisipasi perempuan pada lembaga legislatif, perempuan profesional dan sumbangan pendapatan perempuan dan IDG ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB.

Indikator lain yang mendukung sasaran strategis ini seperti tertera di bawah ini. Berikut ini uraian kerjanya:

#### **A. Indeks Pemberdayaan gender**

- a. Membandingkan antara target dan realisasi

Realisasi kinerja tahun 2020 belum tersedia data (NA) data dari target 60,67.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun 2018 yaitu 60,56 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 51,91 sedangkan tahun 2020 belum tersedia data dari BPS,

Tabel  
Capaian IDG

NO	INDIKATOR	CAPIAN		
		2018	2019	2020
1	IDG	60,56	51,91	NA

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Capaian kinerja tahun 2019 yaitu 51,91 dengan target jangka panjang 53,91 (sesuai usulan revisi target RPJMD) masih terjadi selisih atau dibawah target jangka panjang yaitu sebesar 2 digit, artinya untuk mencapai target jangka panjang diperlukan upaya yang serius dengan cara melakukan penyesuaian antara program dan kegiatan mendukung indikator kinerja.

#### **d. Perbandingan dengan standart nasional**

Data Indeks Pemberdayaan Gender di tingkat nasional pada tahun 2018 adalah 72,10 sedangkan Provinsi NTB pada tahun yang sama adalah sebesar 60,56 atau masih dibawah nasional 11,54 digit atau 83,99 %. Sedangkan pada tahun 2019 capain IDG provinsi NTB adalah 51,91 sedang nasional adalah 75,24 atau 68,99%.

Untuk tahun 2020 belum ada data yang dikeluarkan oleh BPS.

Tabel  
Perbandinga dengan standar nasional

NO	INDIKATOR	NTB			NASIONAL		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	IDG	60,56	51,91	NA	72,10	75,24	NA

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian kinerja tahun 2020 belum karena data BPS belum tersedia, namun demikian beberapa hal yang perlu diuraikan:

1) Jenis indikator kinerja

Indikator kinerja indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan jenis indikator kinerja dampak (impact). Dampak merupakan kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

2) Integrasi program

a) Perencanaan umum yang tertuang pada RPJMD Provinsi NTB

Integrasi program di semua perangkat terkait sangat mendukung tercapaiannya target, namun demikian belum ada pembagian tugas setiap perangkat daerah terkait, contohnya komponen pertama yaitu partisipasi perempuan yang duduk pada lembaga legislatif, komponen ini terdiri dari beberapa perangkat daerah yang melaksanakan program antara lain, Bakesbangpoldagri, Biro Kesra, Dinas kesatuan bangsa, BPSDM, dan lain-lain, komponen kedua yaitu perempuan professional perangkat daerah yang mendukung yaitu BKD, BPSDM, Dinkes, Dikbud, BKKBN, Biro Kesra, dan komponen ketiga yaitu sumbangan pendapatan perempuan perangkat daerah yang mendukung yaitu Dinkop dan UMKM, Kehutanan, DKP, Biro Kesra, Kelautan, dan lain-lain.

b) Teknis Evaluasi kinerja RPJMD

Setiap pelaksanaan evaluasi kinerja semestinya dilakukan assessment bersama bagi pemangku kebijakan dengan tujuan bila tidak mencapai target, kemudian upaya apa kedepan yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut, tetapi kondisi sekarang Tim Evaluasi kinerja bisa dilakukan dengan



jalan merevitalisasi kelompok kerja Pengarus Utamaan Gender (POKJA PUG) baik ditingkat provinsi khususnya maupun di tingkat kabupaten/kota.

3) Alternatif solusi

Setiap evaluasi kinerja di pimpim oleh pejabat pemangku kebijakan antara lain Sekretaris Daerahh, Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah didampingi sekretaris dan kepala bidang, sehingga bila target belum tercapai akan disusun kegiatan inovatif dan kreatif.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Berdasarkan indikator kinerja dengan jenis dampak memerlukan SDM yang berkualitas untuk mengelola program dan kegiatan antara lain analis kesetaraan gender, penyusun kesetaraan gender dan pengadministrasi. Keadaan sekarang pengelola kesetaraan gender satu orang berpendidikan SMA dan tidak pernah mengikuti Diklat teknis maupun manajemen sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum maksimal.

Disisi lain anggaran sangat minim sehingga belum cukup untuk menyusun program dan kegiatan yang dapat menunjang langsung pencapaian target kinerja. Target kinerja akan tercapai bila beberapa outcome program berhasil dilaksanakan secara terus menerus.

**g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel  
Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis  
(Sumber dana APBD NTB) Tahun 2020

Program /Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	32.800.000	28.610.000	87,23
Penguatan Kelembagaan PUG	32.800.000	28.610.000	87,23
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	141.976.830	140.364.830	98,86
Pembangunan Ketahanan Keluarga	141.976.830	140.364.830	98,86

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu penguatan kelembagaan dengan sub kegiatan yaitu pendampingan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola gender tentang GAP dan GBS setiap perangkat daerah. Jadi bila pengelola sudah memahami penyusunan GAP dan GBS berarti dengan mudah menyusun GAB dan GBS berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD.

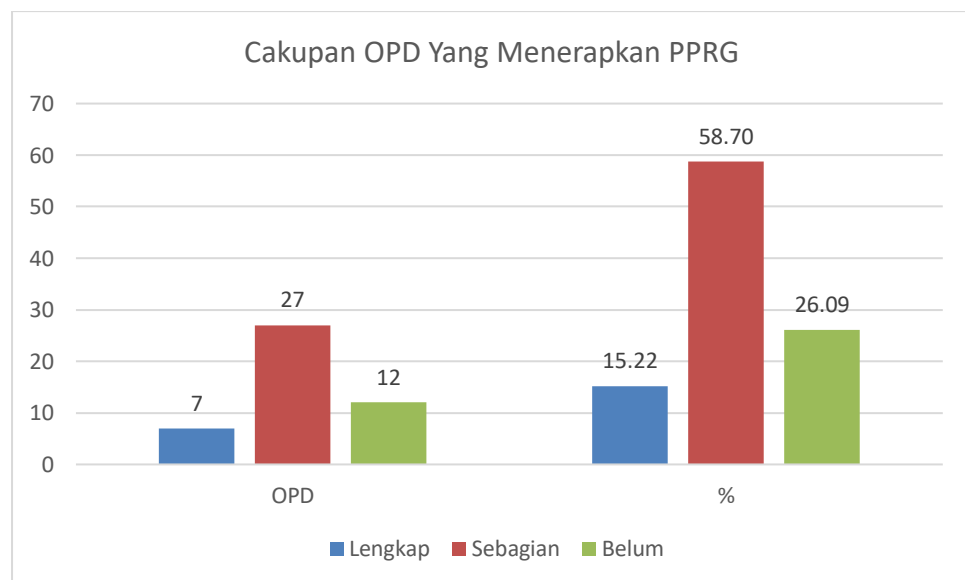
Hasil pendampingan kepada OPD lingkup provinsi NTB dalam upaya mengintegrasikan perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel  
OPD yang mengintegrasikan PPRG

No.	OPD	Focal Point	Renstra	Tahun 2020		Tahun 2021		Ket
				GAB	GBS	GAB	GBS	
1	Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	
2	Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	
3	Dinas ESDM	v	-	v	v	v	v	
4	Dinas Peternakan dan Keswan	v	v	v	v	v	v	
5	Dinas Koperasi UKM	v	-	-	-	-	-	
6	Dinas Perindustrian	v	-	-	-	-	-	
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	v	-	-	-	-	-	
8	Dinas Perkim			v	v			
9	Dinas Perdagangan	v	-	v	v	-	-	
10	Dinas Pariwisata							
11	Dinas PMPD Dukcapil	v	-	-	-	-	-	
12	Dinas PUPR	v	-	v	-	-	-	-
13	Dinas Ketahanan Pangan	v	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Dikbud	v	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	v	v	v	v	v	v	
16	Dinas LHK	v	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Sosial							
18	Dinas Nakertrans	v	-	-	-	-	-	
19	BPSDM	v	v	v	v	v	v	
20	Bappeda	v	-	-	-	-	-	
21	Bakesbangpoldagri							
22	Dispora	-	-	v	v	-	-	
23	Biro Umum	v	-	-	-	-	-	
24	Biro Hukum	v						
25	Biro Pemerintahan							

26	Biro Perekonomian	v	-	-	-	-	-	-
27	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat							
28	Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP	v	-	-	-	-	-	-
29	Biro Organisasi	v	-	-	-	-	-	-
30	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol							
31	Biro Kerjasama	v	-	-	-	-	-	-
32	DPMPTSP	v	v	v	v			
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip	v	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Kominfo	-	-	v	-	-	-	-
35	Inspektorat	v	-	v	v	v	v	v
36	BKD	v	-	-	-	-	-	-
37	BPKAD							
38	Bappenda	v	-	-	-	-	-	-
39	Badan Penghubung Daerah							
40	Satpol PP	v	-	-	-	-	-	-
41	RSU Provinsi							
42	RSU Manangbai Abdul Kadir							
43	RSJ Mutiara Sukma	-	v	-	-	-	-	-
44	Sekt DPRD	v	-	-	-	-	-	-
45	DP3AP2KB	v	v	v	v	v	v	v
46	BPBD	v	v	v	v	v	v	v

Grafik Persentase OPD yang menerapkan PPRG dalam sistim perencanaan



Berdasarkan data tersebut diatas bahwa sebanyak 7 OPD (15,22%) yang sudah lengkap dalam sistem perencanaan penganggaran yang responsif gender sesuai dengan

persyaratan yang berlaku, sedangkan 27 OPD (58,70%) sudah mengintegrasikan dalam perencanaan tapi belum lengkap sedangkan 12 OPD (26,09%) belum sama sekali.

Tabel

Perbandingan capaian kinerja Persentase OPD yang Menerapkan PPRG

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Meningkatnya prosentase OPD yang menerapkan PPRG		45	26,09		15,26	15,22

### 1. Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Untuk mendukung tercapainya indeks pemberdayaan gender diperlukan peningkatan kuantitas perempuan yang bekerja. Semakin banyak perempuan yang bekerja artinya pendapatan perempuan bertambah.

Tabel

Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	19,27	NA

Tabel

Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

NO	URAIAN	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
1	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	18,6	19,27	26,50	NA

### 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

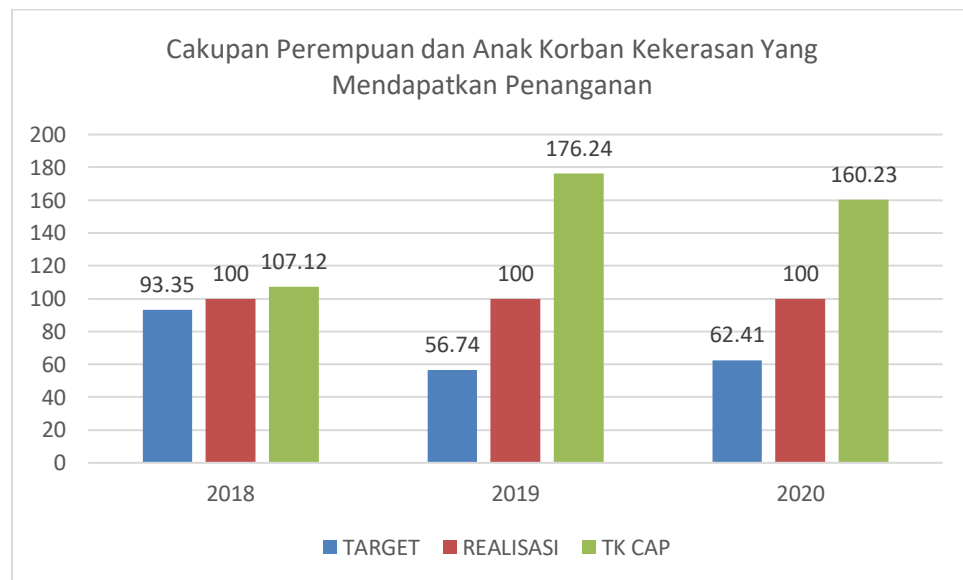
#### a. Membandingkan antara target dan realisasi

Realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 100,00% dari target 62,41% dengan tingkat capaian 160,23%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja kategori sangat berhasil

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun 2018 realisasi kinerja 100,00% dari target 93,35% , Tahun 2019 yaitu 100,00% dari target 56,74% sedangkan tahun 2020 realisasi 100% dari target 62,41% perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan , seperti pada grafik berikut.

Grafik



- c. *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja sebesar 100,00% dari target renstra jangka panjang yaitu 83,07%, hal ini menunjukkan kinerja untuk jangka panjang akan mudah dicapai karena tahun pertama RPJMD dan Renstra capai kinerja jauh di atas target.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/peurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penyebabnya adalah mulai awal tahun 2020 di Provinsi NTB sudah mulai didirikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari kabupaten/kota dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup

Provinsi NTB. Selain hal tersebut melalui anggaran perubahan untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima juga didirikan shelter rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi NTB dalam upaya mencegah, menangani dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, OPD terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.

*e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Sumber daya walaupun masih sangat terbatas, namun kerja kerasnya penanganan kasus kekerasan dapat diselesaikan dengan baik dan adanya dukungan dana yang memadai.

*f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Tabel  
Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis  
(Sumber dana APBD NTB) Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)		LOKASI KEGIATAN
		TARGET	REALISASI	
1	Program penguatan kelembagaan PUG dan anak			
a	Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan	20 Or	20 Or	Mataram
b	Pendampingan dan penanganan kasus	84 Or	84 Or	Mataram, Sumbawa, Bima

3. Rata – Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

**Dampak negatif dari perkawinan dini/muda** antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya kasus perceraian, rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan swasta, tingginya angka kematian ibu dan bayi yang disumbang oleh perkawinan terlalu muda yaitu usia di bawah 18 tahun

Apabila upaya pendewasaan usia perkawinan dapat diwujudkan dengan target 21 tahun di akhir program (Tahun 2023) dari rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka **dampak**

*positifnya adalah* mencegah ledakan jumlah penduduk, mencegah risiko kehamilan dan melahirkan sekaligus memperpendek waktu kehamilan dan melahirkan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan perempuan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang mandiri dan berkarier dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk memudahkan pemahaman perhitungan dari indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka formulasi perhitungannya adalah jumlah usia kawin pertama perempuan pada sampel dibagi jumlah sampel di kali faktor pengali. Berdasarkan tabel 3.2 di atas akan menguraikan perbandingan kinerja yaitu:

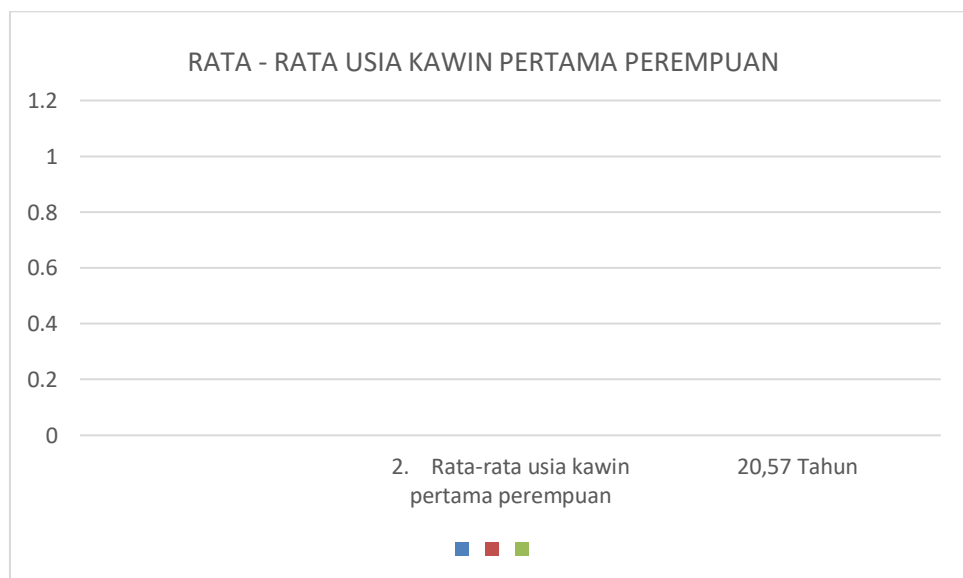
a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

Realisasi kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan tahun 2020 adalah 20,35 dari target yaitu 20,57 atau 98,93%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih belum bisa mencapai target kinerja, dengan demikian realisasi kinerja kategori sangat berhasil.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja mengalami fluktuatif dimana pada saat kondisi awal RPJMD tahun 2018 20,23 tahun, tahun 2019 realisasi 20,21 tahun dari target 21,42 tahun dan tahun 2020 realisasi 20,35 tahun dari target 20,57 tahun. Bila dibandingkan realisasi dari tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan.

### Grafik



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra

Realisasi kinerja sebesar 20,35 tahun dari target renstra 21 dengan persentase realisasi dari target masih dibawah target yaitu 96,90%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

d.1. Analisis atas jenis indikator kinerja

Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan dengan indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan *jenis indikator kinerja outcome intermediate*. Permasalahan yang mendasar yaitu ingin merubah budaya perkawinan dini/muda dikalangan remaja putri yaitu usia 10-20 Tahun *menjadi* pendewasaan usia perkawinan dengan usia antara 21 – 30 tahun (usia yang paling aman untuk kehamilan dan melahirkan).

Persentase perkawinan pertama perempuan berdasarkan kelompok umur > 20 tahun Provinsi NTB tahun 2020 adalah 52,18%

Persentase perkawinan pertama perempuan berdasarkan kelompok umur > 20 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 50,58% menjadi 52,18% tahun di tahun 2020

d.2. Sampel penelitian susenas (BPS NTB) Tahun 2020.

Sampel yang diambil atau dipilih pada survei sosial dan ekonomi nasional (susenas) tahun 2020 yaitu semua perempuan yang kawin pertama hingga tahun 2020.

d.3. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu penghambat pencapaian target antara lain:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 point 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun telah mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- 2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa usia anak yaitu 0 - <18 Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya, sehingga kebijakan umum Kementerian PPPA RI bahwa



perkawinan pertama perempuan dapat dilangsungkan pada usia di atas 18 tahun, sedangkan dari sudut pandang kesehatan reproduksi remaja yaitu usia yang paling aman adalah usia 21-30 tahun.

#### d.4. Integrasi program dan kegiatan

Perkawinan dini/muda merupakan masalah serius yang harus diatasi bersama dan kondisi sekarang ini integrasi program dan kegiatan oleh OPD terkait dan mitra kerja belum maksimal dilaksanakan. Peran OPD terkait sangat membantu untuk menurunkan kasus perkawinan dini/muda, sehingga pada akhirnya Provinsi NTB bebas dari perkawinan dini/muda sekaligus menghilangkan stigma negatif di masyarakat.

#### d.4. Alternatif solusinya

Dari jumlah remaja usia 10-20 tahun akan diberi penyuluhan tentang kespro minimal 10% bagi anak yang tidak sekolah, kemudian usia 10-17 tahun yang tidak sekolah 20% mengupayakan untuk kembali sekolah dan usia 10-20 tahun mengupayakan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki yaitu membawa lari perempuan sehingga tidak terjadi perkawinan dini/muda.

#### e. Perbandingan atas efisiensi penggunaan sumber daya

##### e.1. Sumber daya manusia

Mengingat indikator kinerja jenis outcome intermediate membutuhkan kucuran dana yang besar, dan kondisi saat ini (Covid 19) dana yang diberikan hanya Rp. 169.547.062 yang semestinya dana yang dibutuhkan lebih kurang Rp. 6.500.000.000., sehingga belum semua program dapat dilaksanakan.

##### e.2. Sarana dan prasarana penunjang

Berdasarkan kondisi saat ini seksi pengendalian penduduk bidang PPKB yang menjadi leading programnya, sarana dan prasarana masih kurang hal ini mengakibatkan pelaksanaan program terhambat.

#### f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan yaitu 3 program dan kegiatan yaitu:

##### a. Program kesehatan reproduksi remaja

- 1) Sosialisasi PUP ke masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak dari perkawinan dini dalam mewujudkan PUP.
- 2) Publikasi PUP melalui media cetak dan elektronik  
Publikasi merupakan upaya promosi kesehatan reproduksi bagi remaja dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi terutama dampak dari perkawinan dini, sehingga perkawinan usia dini dapat dicegah
- 3). Pengembangan metode Dialog Warga pada beberapa kelompok masyarakat

**Tabel**  
**Persentase Perempuan 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020**

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur Perkawinan Pertama									Total
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	
Lobar	2,69	39,40	43,39	11,49	2,45	0,50	0,08	-	-	100,00
Loteng	3,69	56,23	31,55	6,84	1,05	0,31	0,23	0,11	-	100,00
Lotim	1,56	53,15	35,65	7,62	1,36	0,33	0,08	0,25	-	100,00
Sumbawa	1,36	34,77	42,08	16,53	2,95	2,16	0,07	0,08	-	100,00
Dompu	1,99	37,09	42,30	15,35	2,68	0,49	-	0,11	-	100,00
Bima	2,26	34,63	45,48	12,76	3,74	0,71	0,20	0,23	-	100,00
KSB	2,15	34,92	39,73	16,64	5,31	0,77	0,44	0,04	-	100,00
KLU	1,60	44,00	42,61	10,45	0,92	0,41	-	-	-	100,00
Mataram	1,55	36,49	40,69	17,67	2,76	0,72	0,13	-	-	100,00
Kota Bima	0,64	30,98	43,79	19,20	3,48	1,36	0,54	-	-	100,00
NTB	2,20	44,92	38,70	11,15	2,13	0,63	0,14	0,12	-	100,00

## 2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Tahun 2020

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2020

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (N-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Renja SKPD Tahun (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2020	
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja (2019)	Tingkat Realisasi 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100%	100,00	100,00	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<u>Output :</u>	1000	1000	1000	1000	100,00	120	120	100
	Jumlah surat			Surat			Surat	Surat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	<u>Output :</u>	2	2	2	2,00	100,00	2	2	100
	Jumlah/Jenis Rekening			Rekening			Rekening	Rekening	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	<u>Output :</u>	8	8	8	8,00	100,00	8	8	100
	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan			Orang			Orang	Orang	
Penyediaan jasa	<u>Output :</u>	11	11	11	11,00	100,00	11	11	100

kebersihan kantor	Jumlah tenaga Kebersihan			Orang			Orang	Orang	
Penyediaan alat tulis kantor	<u>Output :</u>	41	41	41	41	100,00	41	41	100
	Jumlah/Jenis			Jenis			Jenis	Jenis	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<u>Output :</u>	15	15	15	15,00	100,00	15064	15064	100
	Jumlah/Jenis			Jenis			Lembar	Lembar	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<u>Output :</u>	4	4	4	4,00	100,00	3	3	100
	Jumlah/Jenis			SKH/Eks			SKH/Eks	SKH/Eks	
Penyediaan makanan dan minuman	<u>Output :</u>	420	420	420	420	100,00	420	420	100
	Jumlah Orang			Orang			Orang	Orang	
Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	<u>Output :</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	10	10,00	100,00	10	10	100
	Jumlah SPPD			Orang			Orang	Orang	
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	<u>Output :</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1,00	100,00	1	1	100
	Jumlah tenaga teknis perkantoran			Orang			Orang	Orang	
Penyelarasan program Provinsi dan kabupaten/kota	<u>Output :</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	15	15	100,00	15	15	100
	Jumlah SPPD			Orang			Orang	Orang	

Penyediaan alat listrik dan elektronik	<u>Output :</u>	25	25	25	25,00	1,00	7	7	100
	Jumlah/Jenis alat listrik yg tersedia			Jenis			Jenis	Jenis	
Program Peningkatann Sarana dan Prasana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	100	10000%	100	100,00	100%	100%	100
Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	<u>Output :</u>	17	17	17	17	100,00	4	4	100
	Jumlah/Jenis peralatan yang tersedia			Jenis			Jenis	Jenis	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	<u>Output :</u>	27	27	27	27,00	100,00	1	1	100
	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4			Unit			Gedung	Gedung	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	<u>Output :</u>	7	7	7	7	100,00	27	27	100
	Jenis peralatan penunjang kegiatan kantor			Jenis			Unit	Unit	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	<u>Output :</u>						7	7	100
	Jenis peralatan penunjang kegiatan kantor						Jenis	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100
	<u>Output :</u>	60	60	60	60,00	100,00	203	203	100
	Jumlah peserta pembinaan mental dan fisik aparatur			Orang			Orang	Orang	

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Pelaporan	6	6	7	6,00	85,71	6	6	100
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<u>Output :</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1,00	100	2	2	100
	Dokumen LKIP			Dokumen			Dokumen	Dokumen	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<u>Output :</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1,00	100	1	1	100
	Dokumen Laporan Keuangan			Dokumen			Dokumen	Dokumen	
Penyusunan rencana kerja SKPD	<u>Output :</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	4	4,00	100,00	3	3	100
	Dokumen Renja			Dokumen			Dokumen	Dokumen	
Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan	<u>Output :</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1		0	9	9	100
	<u>Dokumen laporan tahunan</u>			Dokumen					
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	1	1	1	1	100	1	1	100
Peningkatan manajemen asset/barang Milik daerah	<u>Output :</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1,00	100	1	1	100
	Dokumen Aset								
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	42,22	42,22	51,11	15,56	30,44	62,22	62,22	100
Penguatan Kelembagaan	<u>Output :</u>	-	-	200	0,00	0	104	104	100

PUG	Peserta pertemuan Pokja PUG dan pendampingan teknis PPRG			orang			orang	orang	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	20,23	20,23	20,42	-	0,00	20,57	20,35	98,93
Advokasi Dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	<u>Output :</u>	-	-	200	200,00	100,00			
	Jumlah peserta penyuluhan kespro dan PUP			Orang					
<i>Pendewasaan Usia Perkawinan ke Masyarakat</i>	<u>Output :</u>			500	500	100,00	1050	1050	100
	Jumlah peserta penyuluhan PUP			Orang			Orang	Orang	
Pengembangan metode DW pada beberapa kelompok masyarakat	<u>Output :</u>	-	-	2	2,00	100,00	8	8	100
	Jmlh Desa pengembangan Dialog Warga			Desa			Orang	Orang	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	30	30	50	40	80,00	60	60	100
Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota	<u>Output :</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	5	5,00	100,00	6	6	100
	Jumlah kab/kota yg di advokasi			Kab			Kab	Kab	
Pengembangan sistem informasi gender dan anak	<u>Output :</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1,00	100,00	0	0	
	Dokumen Sistem Informasi gender dan anak			Dok			Dok	Dok	

Kegiatan temu anak/ forum anak	<u>Output :</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	530	530,00	100,00	300	300	100
	Peserta temu anak			Orang			Orang	Orang	
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<u>Output :</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2	2,00	100,00	0	0	
	Desa percontohan/model Ketahanan Keluarga			Desa			Desa	Desa	
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	<u>Output :</u>	-	-	125	125,00	100,00	20	20	100
	Jumlah peserta sosialisasi			Orang			Orang	Orang	
Pendampingan dan Penangan Kasus	<u>Output :</u>	-	-	2	2,00	100,00	540	540	100
	Desa model kampung damai			Desa			Orang	Orang	
Pendampingan Korban Kekerasan	<u>Output :</u>	-	-	275	275,00	100,00	20	20	100
	Jumlah peserta pelatihan			Orang			Orang	Orang	
Kegiatan P2TP2A	<u>Output :</u>	-	-	0		0,00	0	0	
				Orang			Orang	Orang	
Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	<u>Output :</u>	-	-	500	500	100,00	450	450	100
	Jumlah peserta sosialisasi			Orang			Orang	Orang	
Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB	<u>Output :</u>	-	-	100	100	100,00	0	0	
				%			%	%	
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB	<u>Output :</u>	-	-	40	40	100,00	11660	11660	100
	Jumlah peserta rakor			Orang			Orang	Orang	



Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	<u>51,88</u>	<u>51,88</u>	56,74	100	176,24	62,41	62,41	100
Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	<u>Output :</u>	-	-	20	20,00	100,00	185	185	100
	Jumlah peserta pelatihan			Orang			Orang	Orang	
Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	<u>Output :</u>	-	-	3	2,00	66,67	330	330	100
	Desa PATBM yang di bina			Desa			Orang	Orang	
Penyediaan sarana dan prasarana Bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan	<u>Output :</u>	-	-	1	1,00	100,00	0	0	
	Jumlah sarpras yang disediakan			Unit					
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	<u>Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja</u>	0,075	0,075	0,086	0,081	94,29	0,110	0,110	100
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	<u>Output :</u>	-	-	60	30	50,00	60	60	100
	Jml peserta pelatihan bimbingan manajemen usaha			orang			orang	orang	
Temu PUSPA daerah	<u>Output :</u>	-	-	60	60,00	100,00	22	22	100
	Jumlah peserta temu Puspa di tingkat Provinsi			orang			orang	orang	

Pelatihan Advokasi Politik Perempuan	<u>Output :</u>			40	40,00	100,00			
	Jumlah anggota Parpol yang di advokasi			orang					
Pembangunan Ketahanan Keluarga	<u>Output :</u>	-	-	30	0,00	0,00	134	134	100
	Jml peserta sosialisasi ketahan keluarga			orang			orang	orang	
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	<u>Cakupan Anggota kelompok BKB, BKRYang ber KB</u>	66,42	66,42	66,92	76,86	114,85	67,87	67,87	100
Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok masyarakat	<u>Output :</u>	-	-	40	40	100,00	420	420	100
	-	-	-						
	-	-	-						
Kegiatan Hari Ibu, Hari Kartini, HUT Dharma Wanita, HKG PKK	-	-	-	350	350	100,00			
				org					
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Kelompok PIK-R yang aktif	14,2	14,2	1,89	0,69	36,36	1,89	1,89	100
Penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (KRR)	<u>Output :</u>	-	-	40	40	100,00	180	180	100
	Jml peseta konseling keluarga melalui BKB			org			org	org	
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	14,2	14,2	2,8	4,42	157,68	2,8	2,8	100

Pelatihan Pendampingan Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	<u>Output :</u>	-	-	232	232	100,00	280	280	100
	Jml peserta konseling keluarga melalui BKB			org			Orang	Orang	
Program Pengembangan Posyandu BKB	<u>Jumlah Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)</u>					-	19,20	19,20	100
Pembekalan bagi Penyuluh tentang PUP	<u>Output :</u>						420	420	100
	<u>Jumlah penyuluh yang ikut pembekalan</u>						Orang	Orang	
Bintek tentang PUP bagi tenaga pendidik	<u>Output :</u>						47	47	100
	Jumlah tenaga pendidik yang ikut bimbingan teknis						Orang	Orang	
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	<u>Persentase siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS</u>						1,37	1,37	100
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	<u>Output :</u>						300	300	100
	<u>Jumlah siswa peserta penyuluhan narokab dan PMS</u>						Orang	Orang	



### 2.1.2. Capaian Renstra DP3AP2KB Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2019	Realisasi Capaian Tahun 2019	Rasio Capaian pada tahun 2019
1	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	TH	21	20,57	20,35	98,93
3	Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KTP/A)	% Pelayanan	100	62,41	100	160,23

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pada sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan format Tabel T-C.2 berikut.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTB

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH									
DP3AP2KB PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IDG	Indeks	60,22	60,24	60,26	60,28	51,91	NA	60,26	60,28
IPG	Indeks	90,73	90,74	90,75	90,76	90,40	NA	90,75	90,76
Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	51,11	62,22	75,56	88,89	15,56	15,22	75,56	88,89
Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang undangan yang responsif gender dan anak.	%	50	60	70	80	40		70	80
Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,086	0,110	0,135	0,159	0,081		0,135	0,159
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	56,74	62,41	68,65	75,52	100	100	68,65	75,52
Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	%	66,92	67,67	68,67	69,92	76,86		68,67	69,92
Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	%	2,8	2,8	2,8	2,8	4,42		2,8	2,8



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berpedoman pada Visi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 20025-2025 tahap ke-4 serta Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**. Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci **“NTB GEMILANG”** yang bermakna:

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, social dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan DP3AP2KB Provinsi NTB, mendukung pencapaian Misi ke-3 dan Misi ke-6 sebagai berikut:

Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah

Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	1. Terjadinya berbagai praktik	Terbatasnya personil yang	• Adanya komitmen



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Peringkat Daerah	Faktor	
			Pengambat	Pendorong
		<p>buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>2. Munculnya berbagai tindakan kekerasan terhadap anak</p> <p>3. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p>	<p>melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p>
2	<p>Misi: 6 NTBAMANDANBERKAHmelaluiwujudanmasyarakatmadaniyangberiman,berkarakterdanpenegakanhukumyangberkeadilan.</p> <p>Tujuan: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani.</p>	<p>1. IPG meningkat namun</p>	<p>• Pelaksana Perencanaan</p>	<p>• Adanya komitmen</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Peringkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sasaran: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	<p>relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</p> <p>2. IDG rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</p> <p>3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <p>4. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan</p>	<p>dan penganngaran responsif gender belum optimal .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganngaran responsif gender</li> <li>• Terbatasnya personal yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<p>kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A.</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Peringkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>uan sangat rentan terhadap kekerasan.</p> <p>5. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <p>6. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p>		

## Permasalahan DP3AP2KB

NO.	URAIAN	KONDISI EKSISTING (2019)	KONDISI IDEAL	GAP
1.	IDG	51,91	75,24	23,33
2.	Rata-rata Usia Kawin	20,21	21	0,79
3.	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	18,60	20,47	1,87
4.	Cakupan Kab./Kota yang mendapat predikat KLA	40	100	60

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Provinsi NTB menurut urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sesuai dengan hasil identifikasi dari hasil evaluasi dan perkembangan kondisi terkini di Provinsi NTB.

1. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di provinsi NTB.
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Rata-rata usia kawin pertama yang masih rendah khususnya di beberapa kabupaten antara lain Kabupateb Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Timur yaitu dibawah 20 tahun.
4. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang belum optimal dalam pelaksanaannya meskipun sudah semua OPD dilatih tentang GAB dan GBS.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran DP3AP2KB Provinsi NTB; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab DP3AP2KB Provinsi NTB; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap urusan yang menjadi kewenangan DP3AP2KB Provinsi NTB; (4)



Tabel T- C.4  
Pencapaian kinerja Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB

KD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	LOKASI	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen	2
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Dokumen	3
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	1
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
102	Administrasi Keuangan				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Orang	59
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dokumen	1
7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Dokumen	1
8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Dokumen	1
103	Administrasi Umum				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat	975

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rekening	2
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS				
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Orang	1
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (termasuk tenaga PTT)			Orang	9
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				20
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jenis	15
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Lembar	52562
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Paket	5
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			SKH	3
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Paket	1
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Tahun	1
23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Paket	1
26	Pengadaan Mebeleur			Paket	4
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Unit	1

31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Unit	30
33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Jenis	10
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	64,4
101	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		41
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB	Orang	30
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi				
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB	Orang	45
102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik	%	37,2
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Kader Parpol Ikut FGD	Orang	20
103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	20
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Anggota PUSPA Ikut FGD	Orang	30
	BIDANG PHP				
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)		820
101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				240



1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	237
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	Target	3
103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				580
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Peserta Advokasi	Orang	50
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	30
3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Orang	500
4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Index Ketahanan Keluarga	%	4,5
101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Perempuan yang memiliki usaha	Orang	30
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Advokasi	Orang	60
3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Perempuan Terlatih Manajemen Usaha	Orang	60
102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa	3
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Motekar Terlatih	Orang	60

3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Provinsi		Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA	Jumlah	4
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender		60
101	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Data Gender dan Anak	Buku	60
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Buku Gender dan Anak	Cetakan	60
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60
101	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			%	60
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewengan provinsi			%	60
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100%
101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				570
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Pola Asuh Anak +Sosialisasi Upaya Perlindungan anak di sekolah)		Meningkatnya Pemahaman upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 570 orang	orang	570
103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				336

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (PATBM)		Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	orang	36
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (penyl Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah)		Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	anak	300
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Pendewasaan Usia Perkawinan	Tahun	20,7
101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase	40
3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK		1. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Orang	30
7	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat		2. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Orang	1000
102	Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB		OPD/Badan	0	10
2	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga		1. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK	Orang	50
			2. Jumlah Kabupaten/Kota yang di Banwas dalam penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Rumah Data Kependudukan	Kab/Kota	4
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		JUMLAH KELAHIRAN REMAJA (PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN) PER 1000 PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN (ASFR 15-19)	%	38
			JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PERATURAN UNTUK MENDUKUNG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN	buah	8

101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah mitra kerja yg difasilitasi dgn materi KIE	kelompok	8
6	Penguatan Kerja Sama dengan <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK		Jumlah mitra kerja yang difasilitasi	kelompok	8
8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal		Jumlah Materi KIE yg dihasilkan	Dokumen	3
102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah organisasi masyarakat yg terlibat dlm pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	kelompok	3
2	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah masyarakat yg terlibat dlm pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	kelompok	3

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO,
3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
  - Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
  - Angka kematian ibu dan bayi
  - Penurunan penggunaan kontrasepsi modern
  - Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
  - Kebutuhan ber kb PUS yang belum terlayani (unmet need) masih tinggi
  - Prevalensi stunting masih tinggi
  - Pernikahan usia anak
  - Pemahaman fungsi keluarga yang rendah

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Provinsi NTB menurut urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sesuai dengan hasil identifikasi dari hasil evaluasi dan perkembangan kondisi terkini di Provinsi NTB.

1. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di provinsi NTB.
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Rata-rata usia kawin pertama yang masih rendah
4. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang belum optimal dalam pelaksanaannya meskipun sudah semua OPD dilatih tentang GAB dan GBS.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti table berikut.

**Tabel**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM
Misi 3 yaitu NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi daya saing daerah	Terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH)	Rata-rata usia kawin pertama perempuan
					Cakupan PIK-R yang aktif
					Cakupan BKR, BKL dan BKB ber-KB
					Ratio akseptor KB
					Persentase peserta KB mandiri
					Persentase Tenaga PLKB /PKB yang berwawasan tribina
					Persentase siswa tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS
					Persentase

		balita stunting	nya asupan gizi masyarakat	balita stunting	anggota BKB menggunakan KKA
Misi 6 yaitu NTB aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani	Indeks pembangunan gender (IPG)	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja
					Persentase Kab/Kota yang memiliki PPU yang mendukung PUG dan PUHA
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
					Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG.
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
					Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur
					Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Dokumen Pelaporan
					Manajemen Aset

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (1)	Meningkatnya perangkat daerah yg menerapkan PPRG (1)	<b>Indikator Tujuan :</b> Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.  <b>Indikator Sasaran :</b> Meningkatnya prosentase OPD yang menerapkan PPRG	18,60  13,04	17,93  26,09	18,60  39,13	19,27  52,17	20,47  65,28
2.	Terwujudnya Kabupaten/Kota yang mendapat Predikat KLA (2)	Meningkatnya jumlah kab/kota yang telah memenuhi hak anak (2)	<b>Indikator Tujuan :</b> Persentase kab/kota yang mendapatkan predikat KLA  <b>Indikator Sasaran :</b> Jumlah kab/kota yang memenuhi hak anak	40  4	40  4	60  6	80  8	100  10
3.	Terwujudnya pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas (3)	Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan (3)	<b>Indikator Tujuan :</b> Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan  <b>Indikator Sasaran :</b> Prosentase usia perkawinan pertama perempuan diatas umur 20 tahun	20,42  50,58	20,50  51,00	20,70  51,50	20,90  52,00	21,00  52,50

Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang Gemilang pada Tahun 2019-2020 menunjang Misi ke 3 NTB Sehat dan Cerdas serta Misi Ke-6 yaitu “NTB AMAN DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan melalui 15 program. Pada tahun 2020-2023 DP3AP2KB Provinsi NTB selain mendukung Misi ke-6 juga mendukung Misi Ke-3 NTB Sehat dan Cerdas melalui Program Unggulan “Ayo Bercita-cita” dan “Paud Holistic Integratif”.



Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsi disajikan dalam table 5.2 berikut :

<b>TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DP3AP2KB</b>			
<b>VISI : <i>MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG</i></b>			
MISI NTB SEHAT, DANCERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah			3
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Kabupaten/Kota yang mendapat Predikat KLA	Meningkatnya jumlah kab/kota yang telah memenuhi hak anak	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Dilakukan melalui pemenuhan 5 indikator Klaster KLA
<b>MISI 6 : NTB AMAN DAN BERKAH</b> Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pasar kerja	Penguatan Kelembagaan PUG melalui keserasian kebijakan pembangunan	Optimalisasi PPRG
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga
Terwujudnya pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas (3)	Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan (3)	Pendewasaan Usia Perkawinan	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk dapat mengimplementasikan visi, misi melalui strategi dan kebijakan, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD dan Reviu RPJMD 2019-2023 serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan Tahun 2021 hingga Tahun 2023 untuk mencapai sasaran dilakukan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (1)
3. Program Perlindungan Perempuan; (1)



**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas P3AP2KB**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 (sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019)**

*(PERLU DIPERBAIKI)*

KD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA AWAL	Target Capaian Tahun 2021	
					Target	Rp. (000)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Dokumen		2	224.116.200
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Dokumen		3	224.116.200
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		1	211.750.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
102	Administrasi Keuangan					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		59	5.899.928.900
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen		1	37.752.000
7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Dokumen		1	12.190.750
8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Dokumen		1	15.118.950
103	Administrasi Umum					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat		975	1.609.300
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening		2	113.498.000
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS					
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Orang		1	26.644.200
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (termasuk tenaga PTT)		Orang		9	136.802.600
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				20	575.000.000
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jenis		15	17.365.920
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Lembar		52562	26.281.200
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket		5	255.830.443
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					

15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		SKH		3	19.989.200
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Paket		1	25.410.000
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Tahun		1	73.205.000
23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Paket		1	191.785.000
26	Pengadaan Mebeleur		Paket		4	191.785.000
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Unit		1	60.500.000
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Unit		30	244.420.000
33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jenis		10	30.008.000
	BIDANG KGKK					
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	2,2	64,4	816.222.800
101	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		40,19	41	653.065.400
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB	Orang	0	30	424.304.200
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi					
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB	Orang	0	45	228.761.200
102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Proporsi kader perempuan di partai politik	%	36,2	37,2	90.750.000
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Parpol Ikut FGD	Orang	0	20	90.750.000
103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	5	20	72.407.400
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anggota PUSPA Ikut FGD	Orang	0	30	72.407.400
	BIDANG PHP					
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)			820	2.220.700.550
101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				240	956.059.500

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	0	237	406.059.500
	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	Target	0	3	550.000.000
103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				580	1.264.641.050
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Peserta Advokasi	Orang	0	50	519.680.300
	Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	0	30	200.002.000
3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Orang	0	500	544.958.750
4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<b>BIDANG KGKK</b>					
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Index Ketahanan Keluarga	%	0	4,5	938.664.000
101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang memiliki usaha	Orang	30	30	198.700.000
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi	Orang	0	60	92.950.000
3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Terlatih Manajemen Usaha	Orang	60	60	105.750.000
102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa	4	3	739.964.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih	Orang	90	60	473.764.000
3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA	Jumlah	1	4	266.200.000
	Kewenangan Provinsi					
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Dokumen Gender			60	384.667.560

101	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Data Gender dan Anak	Buku		60	384.667.560
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak	Cetakan	0	60	384.667.560
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi					
	BIDANG PHA					
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	40	60	967.574.800
101	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		%	40	60	967.574.800
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		%	40	60	446.767.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					520.807.800
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	-	100%	658.519.800
101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				570	331.894.100
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Pola Asuh Anak +Sosialisasi Upaya Perlindungan anak di sekolah)	Meningkatnya Pemahaman upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 570 orang	orang	570	570	331.894.100
103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				336	326.625.700
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (PATBM)	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	orang	36	36	228.149.700
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (penyl Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah)	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	anak	300	300	98.476.000
	BIDANG PPKB					
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan	Tahun	20,23	20,7	

101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase	0	40	
3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Orang	0	30	
7	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan	2. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Orang	500	1000	
	Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat					
102	Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	OPD/Badan	0	0	10	
2	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK	Orang	0	50	
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang di Banwas dalam penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Rumah Data Kependudukan	Kab/Kota	0	4	

3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	JUMLAH KELAHIRAN REMAJA (PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN) PER 1000 PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN (ASFR 15-19)	%	44	38	672.311.478
		JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PERATURAN UNTUK MENDEKUNG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN	buah	10	8	
101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah mitra kerja yg difasilitasi dgn materi KIE	kelompok	10	8	476.460.000
6	Penguatan Kerja Sama dengan <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah mitra kerja yang difasilitasi	kelompok	10	8	200.860.000
8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi KIE yg dihasilkan	Dokumen	0	3	275.600.000
102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg terlibat dlm pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	kelompok	0	3	195.851.478
2	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yg terlibat dlm pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	kelompok	0	3	195.851.478



## Rekapitulasi Kegiatan/Sub Kegiatan untuk Program Unggulan Daerah

**Tabel**  
**Rekapitulasi Kegiatan/Sub Kegiatan untuk Program Unggulan Daerah**

No	Program Unggulan	Kegiatan	Sub Kegiatan	2021		2022		2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Kabupaten/Kota Layak Anak	<p>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p>	<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p>	60		80		100	

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil yang telah dicapai. Hasil yang telah dicapai berupa output dan intermediate Outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2021 seperti pada table 4.1. berikut:

**Tabel 4.1  
Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021**

MISI	IKU RPJMD	IKD/IKK	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Kinerja 2021
	IPG				Indeks	60,26
		IDG			Indeks	90,75
MISI 6 NTB AMAN, NYAMAN DAN BERKAH						
Akselerasi Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	39,13
MISI 3 NTB SEHAT DAN CERDAS						
Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan	Tahun	20,70
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

### **Rencana Program Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019**

Sedangkan Tahun 2021 hingga Tahun 2023 untuk mencapai sasaran dilakukan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (1)
3. Program Perlindungan Perempuan;(1)
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;(1)
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender;(1)
6. Program Pemenuhan Hak Anak;(2)
7. Program Perlindungan Khusus Anak;(2)
8. Program Pengendalian Penduduk;(3)
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);(3)
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;(3)

Dan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas P3AP2KB Provinsi NTB setiap tahunnya membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan realisasi anggaran dengan memuat keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing – masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.



KD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA AWAL	Target Capaian Tiap Tahun					
					2021		2022		2023	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
6	7									
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
101	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		<b>Dokumen</b>		2	224.116.200	1	246.527.820	1	271.180.602
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		<b>Dokumen</b>		3	224.116.200	3	246.527.820	3	271.180.602
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah									
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		<b>Dokumen</b>		1	211.750.000	1	232.925.000	1	256.217.500
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
102	<b>Administrasi Keuangan</b>									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<b>Orang</b>		59	5.899.928.900	59	6.489.921.790	59	7.138.913.969
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<b>Dokumen</b>		1	37.752.000	1	41.527.200	1	45.679.920
7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		<b>Dokumen</b>		1	12.190.750	1	13.409.825	1	14.750.808
8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran									
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		<b>Dokumen</b>		1	15.118.950	1	16.630.845	1	18.293.930
103	<b>Administrasi Umum</b>									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<b>Surat</b>		975	1.609.300	975	1.770.230	975	1.947.253
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<b>Rekening</b>		2	113.498.000	2	124.847.800	2	137.332.580

4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS									
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		<b>Orang</b>		1	26.644.200	1	29.308.620	1	32.239.482
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional									
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (termasuk tenaga PTT)		<b>Orang</b>		9	136.802.600	9	150.482.860	9	165.531.146
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				20	575.000.000	20	632.500.000	20	695.750.000
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja									
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		<b>Jenis</b>		15	17.365.920	15	19.102.512	15	21.012.763
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<b>Lembar</b>		52562	26.281.200	57819	28.909.320	63601	31.800.252
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<b>Paket</b>		5	255.830.443	5	281.413.487	5	309.554.836
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		<b>SKH</b>		3	19.989.200	3	21.988.120	3	24.186.932
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
17	Penyediaan Makanan dan Minuman		<b>Paket</b>		1	25.410.000	1	27.951.000	1	30.746.100
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		<b>Tahun</b>		1	73.205.000	1	80.525.500	1	88.578.050
23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		<b>Paket</b>		1	191.785.000	1	210.963.500	1	232.059.850
26	Pengadaan Mebeleur		<b>Paket</b>		4	191.785.000	4	210.963.500	4	232.059.850
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		<b>Unit</b>		1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		<b>Unit</b>		30	244.420.000	30	268.862.000	30	295.748.200

33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jenis		10	30.008.000	10	33.008.800	10	36.309.680
	BIDANG KGKK									
2	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	2,2	64,4	816.222.800	91,1	897.845.080	100	987.629.588
101	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>		<b>40,19</b>	41	653.065.400	42	718.371.940	43	790.209.134
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB	Orang	0,0	30	424.304.200	30	466.734.620	30	513.408.082
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi									
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB	Orang	0,0	45,0	228.761.200	45,0	251.637.320	45	276.801.052
102	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Proporsi kader perempuan di partai politik</b>	%	36,2	37,2	90.750.000	38,2	99.825.000	39,2	109.807.500
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Kader Parpol Ikut FGD</b>	Orang	0	20	90.750.000	25	99.825.000	30	109.807.500
103	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	%	5	20	72.407.400	25	79.648.140	30	87.612.954
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anggota PUSPA Ikut FGD	Orang	0	30	72.407.400	35	79.648.140	35	87.612.954
	<b>BIDANG PHP</b>									
3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)</b>			820	2.220.700.550	819	2.442.770.605	820	2.687.047.666

<b>101</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				240	956.059.500	239	1.051.665.450	240	1.156.831.995
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	<b>jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>Kasus</b>	<b>0</b>	237	406.059.500	237	446.665.450	237	491.331.995
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	<b>Tersedianya layanan pengaduan masyarakat</b>	<b>Target</b>	<b>0</b>	3	550.000.000	2	605.000.000	3	665.500.000
<b>103</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>				580	1.264.641.050	580	1.391.105.155	580	1.530.215.671
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Peserta Advokasi</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	50	519.680.300	50	571.648.330	50	628.813.163
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	30	200.002.000	30	220.002.200	30	242.002.420
3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	500	544.958.750	500	599.454.625	500	659.400.088
4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
	<b>BIDANG KGKK</b>									
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Index Ketahanan Keluarga</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	4,5	938.664.000	5	1.032.530.400	5,5	1.135.783.440
<b>101</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Perempuan yang memiliki usaha</b>	<b>Orang</b>	<b>30</b>	30	198.700.000	40	218.570.000	50	240.427.000



1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Peserta Advokasi</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	60	92.950.000	80	102.245.000	60	112.469.500
3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Perempuan Terlatih Manajemen Usaha</b>	<b>Orang</b>	<b>60</b>	60	105.750.000	60	116.325.000	60	127.957.500
<b>102</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga</b>	<b>Desa</b>	<b>4</b>	3	739.964.000	3	813.960.400	3	895.356.440
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Motekar Terlatih</b>	<b>Orang</b>	<b>90</b>	60	473.764.000	60	521.140.400	60	573.254.440
3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	4	266.200.000	4	292.820.000	1	322.102.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Dokumen Gender</b>			60	384.667.560	80	423.134.316	100	465.447.748
<b>101</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Data Gender dan Anak</b>	<b>Buku</b>		60	384.667.560	80	423.134.316	100	465.447.748
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	<b>Buku Gender dan Anak</b>	<b>Cetakan</b>	<b>0</b>	60	384.667.560	80	423.134.316	100	465.447.748
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi									
	<b>BIDANG PHA</b>									
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	60	967.574.800	80	1.064.332.280	100	1.170.765.508
<b>101</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>		<b>%</b>	<b>40</b>	60	967.574.800	80	1.064.332.280	100	1.170.765.508



2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Pendewasaan Usia Perkawinan	Tahun	20,23	20,70		20,90		21	
101	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase	0	40		60		80	
3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Orang	0	30		40		50	
7	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	2. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Orang	500	1000		1250		1500	
102	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	<b>OPD/Badan</b>	0	0	10		15		20	
2	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1. Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK	Orang	0	50		100		150	
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang di Banwas dalam penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Rumah Data Kependudukan	Kab/Kota	0	4		6		8	
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>JUMLAH KELAHIRAN REMAJA (PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN) PER 1000 PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN (ASFR 15-19)</b>	%	44	38	672.311.478	37	739.542.626	37	813.496.888

		<b>JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PERATURAN UNTUK Mendukung PENEDEWASAAN USIA PERKAWINAN</b>	<b>buah</b>	<b>10</b>	8		8		8	
<b>101</b>	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah mitra kerja yg difasilitasi dgn materi KIE</b>	<b>kelompok</b>	<b>10</b>	8	476.460.000	8	524.106.000	8	576.516.600
6	Penguatan Kerja Sama dengan <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah mitra kerja yang difasilitasi	<b>kelompok</b>	<b>10</b>	8	200.860.000	8	220.946.000	8	243.040.600
8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi KIE yg dihasilkan	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	3	275.600.000	3	303.160.000	3	333.476.000
<b>102</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg terlibat dlm pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	<b>kelompok</b>	<b>0</b>	3	195.851.478	3	215.436.626	3	236.980.288
2	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yg terlibat dlm pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	<b>kelompok</b>	<b>0</b>	3	195.851.478	3	215.436.626	3	236.980.288



## BAB IV PENUTUP

### **A. Kesimpulan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB merupakan perencanaan yang sistematis, terarah yang mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dikatakan anggaran berbasis kinerja. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan titik awal (Entre Point) dalam mengatasi penyebab masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut, sehingga dengan sendirinya hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

### **B. Saran**

1. Rencana Kerja DP3AP2KB Provinsi NTB tetap mengacu pada Rencana Strategi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB.
2. Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Provinsi NTB merupakan hal yang harus diindahkan untuk pelaksanaannya.
3. Apabila Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Provinsi NTB terdapat hambatan/kendala dalam pelaksanaannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya untuk tahun-tahun yang akan datang.